

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SYARAT KEBARUAN (*NOVELTY*) DESAIN INDUSTRI DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan Hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia yang mempunyai nilai ekonomi.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai bagaimana implementasi syarat kebaruan (*novelty*) desain industri dalam perlindungan desain industri di Indonesia dan apakah yang menjadi kelemahan penerapan syarat kebaruan (*novelty*) desain industri dalam perlindungan desain industri di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan diatas adalah dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi syarat kebaruan yang diterangkan sebagai “tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya” secara harfiah dapat dimengerti sebagai “perbedaan sedikit dapat dianggap baru” selama tidak sama dengan desain yang telah ada. Hal ini, berpotensi menimbulkan keadaan dimana terdapat 2 (dua) desain yang berbeda sedikit saja dapat dianggap sebagai desain baru dan ketidak jelasan Undang-Undang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah menimbulkan ketidak pastian hukum maka penafsiran akhir diputuskan berdasarkan pada keputusan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan pedoman yang jelas bagaimana menginterpretasikan syarat kebaruan. Disarankan kepada lembaga pembuat undang-undang perlu secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang desain industri yang ternyata banyak kelemahannya, yang berkaitan dengan penilaian unsur kebaruan suatu desain industri. Disarankan kepada Ditjen HKI agar lebih pro aktif dan lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran desain industri. Disarankan pada penegak hukum agar lebih bijaksan untuk memutuskan suatu perkara gugatan pembatalan yang terkait dengan unsur kebaruan suatu desain industri.

Kata Kunci: *Desain Industri, Implementasi Syarat Kebaruan dan Perlindungan Industri.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS OF NOVELTY (NOVELTY) INDUSTRIAL DESIGN IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION IN INDONESIA

Industrial Design is part of the Intellectual Property Rights (IPR). IPR is a right derived from the creative activity of a human's cognitive ability which is expressed to the public in many kinds which has benefits as well as useful in supporting human life that have economic value.

This method will assess and discuss how implementation of the requirements of novelty (novelty) industrial design in industrial design protection in Indonesia and what kind of weakness in assembling of the requirements of novelty (novelty) industrial design in industrial design protection in Indonesia.

The method of researching which is used for assessing and addressing the above is to use descriptive research method of analysis whereas the approach of research done by using a normative juridical approach.

The result of research showed that implementation of the requirements of novelty which simply described as "not the same as the previous disclosure" Literally can be understood as "a little difference can be considered a new" is not the same as long as the existing design. This, potentially situation where there are two (2) different designs can be regarded as a slightly new design and the lack of clarity in the Industrial Design Act set approach to assessing novelty element has created legal uncertainty, the final interpretation is decided based on the judge's decision.

According to the results of researching and discussing can be concluded Industrial Design Act which does not give clear compass how to interpret requirements of novelty. It is recommended to institute law makers need to continuously make improvements to the legislation that was a lot of weaknesses in this regard industrial design law relating to the assessment of novelty element of an industrial design. It is suggested to the directorate general of IPRs to be more pro-active and more selective in accepting the application for registration of industrial designs To be seen more carefully about the elements of novelty contained in a registered design disarankan kepada want law enforcement to be more prudent to decide a case Cancellation of an industrial design lawsuit related to the novelty of an industrial design elements.

Key words: Industrial Design, Implementation Of Requirement Of Novelty, and Industrial Protection